

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2019



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga laporan kinerja instansi pemerintah (LKJ-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2019 dapat disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah pada lampiran II penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan ini bertujuan untuk dapat mengukur dan meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan secara optimal dan terpadu antara program kegiatan.

Diharapkan kinerja yang telah tercapai dapat terus dipertahankan dan yang masih belum memenuhi target dapat ditingkatkan melalui daya dukung dan sumber daya manusia yang memadai.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan termasuk penyusunan LKJ-IP ini masih terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan laporan kedepan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, serta kita semua selalu mendapat limpahan barokah dan hidayah Allah SWT. Aamiin.

**Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan**

H. Sujadi, A.Pi
NIP. 19631121 199003 1 004

IKHSTIAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya pemerintah yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita- cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

LKJ-IP ini disusun sebagai tindaklanjut dari menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiv atas laporan kinerja instansi pemerintah. Peraturan menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing – masing instansi. Dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kinerja pemerintah SKPD.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Secara umum berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dapat terlaksana dengan baik namun disadari masih banyak hal yang harus di tingkatkan seperti adminitrasi yang di luar kendali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Personil yang belum memadai, Penerapan aturan yang kadang tidak sepaham antara pemangku kepentingan dengan OPD pelaksana.

Dengan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi diharapkan LKJ-IP ini akan dapat memenuhi unsur – unsur yang dipersyaratkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHSTIAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau	1
1.3 Struktur dan organisasi	3
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	20
2.1 RENCANA STRATEGIS	20
2.1.1 Visi dan Misi	20
2.1.2 Tujuan dan sasaran	23
2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan Program.....	24
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	34
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	38
2.4 Perjanjian Kinerja	47
BAB III . AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	49
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	51
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	55
3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini.....	55
3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dan Kinerja tahun lalu.....	57
3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka Menengah yang terdapat pada dokumen strategis Organisasi	58
3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja yang telah dilakukan.....	59
3.3.5 Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya	60
3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan	60
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	
3.4 Realisasi Anggaran	64
BAB IV. PENUTUP.....	68
LAMPIRAN - LAMPIRAN:	
- Rencana Kinerja Tahunan	
- Perjanjian Kinerja	
- Pengukuran Kinerja Tahunan	
- Indikator Kinerja Utama	
- Matrik Rencana Strategis	
- Rencana Aksi	
- DUK	
- Kartu Inventaris Barang	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah Kabupaten Berau adalah Pembangunan Masyarakat Kabupaten Berau seutuhnya yang mana hasilnya dinikmati langsung seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Berau.

Guna melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan hati nurani rakyat, maka dipandang perlu untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini guna meningkatkan keserasian antara pelaksanaan pembangunan dengan aspek lingkungan.

Keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sangat diperlukan sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator Perencanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DLHK Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, didalamnya terdapat Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, tugas pokok dari DLHK

Kabupaten Berau adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DLHK Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan Kebersihan
- d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
- e. Pelaksanaan UPTD.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan

Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

Dari tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis pembangunan Kabupaten Berau.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

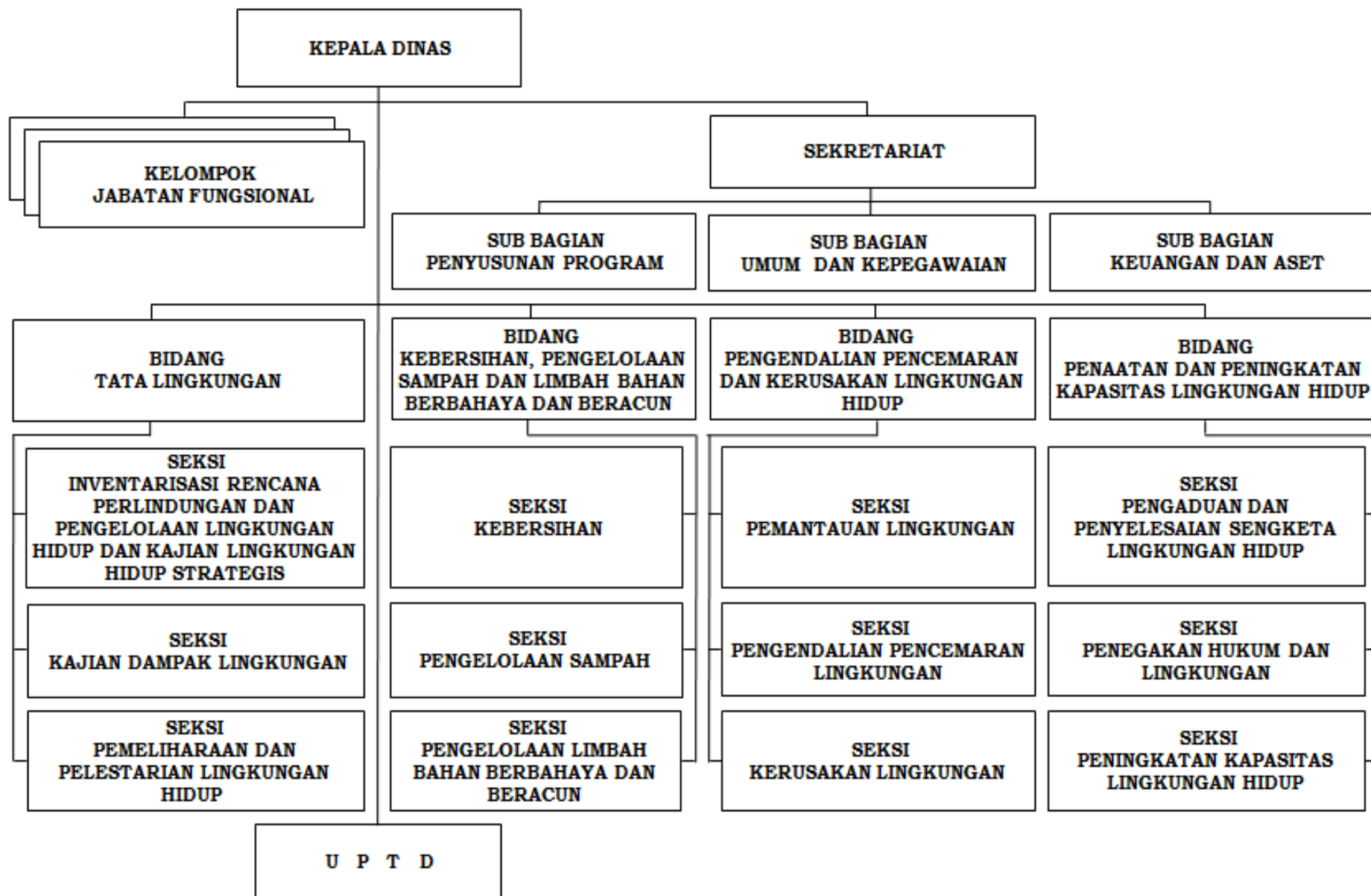
b. Sekretaris membawahi tiga sub bagian yaitu :

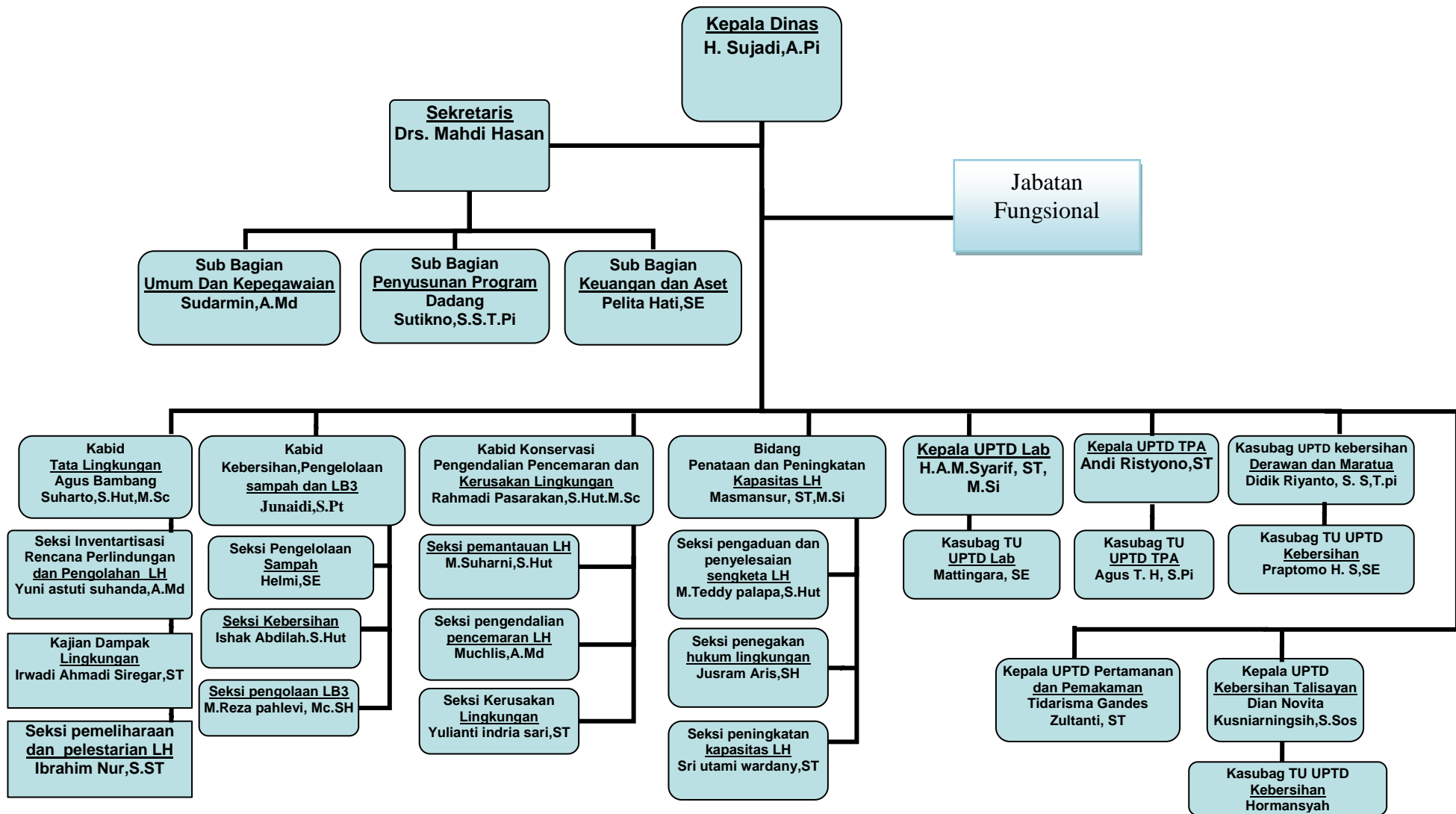
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Keuangan dan aset.

c. Bidang Tata Lingkungan membawahi :

- Seksi inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH dan KLHS
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan

- Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian LH
- d. Bidang kebersihan, Pengelolaan sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun membawahi :
- Seksi Kebersihan
 - Seksi pengelolaan Sampah
 - Seksi Pengelolaan LB3
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
- Seksi Pemantauan Lingkungan;
 - Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Seksi Kerusakan Lingkungan;
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - Seksi Penegakan Hukum dan Lingkungan;
 - Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- f. UPTD
- UPTD Laboratorium Lingkungan
 - UPTD Kebersihan Pulau Derawan dan Pulau Maratua
 - UPTD Kebersihan Talisayan
 - UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
 - UPTD Pertamanan dan Pemakaman
- h. Kelompok Jabatan Fungsional:





1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 82 orang, dimana 69 orang diantaranya adalah laki – laki dan 13 orang diantaranya perempuan. Berdasarkan golongan, ASN golongan IV berjumlah 7 (tujuh orang), golongan III 34 (tiga puluh empat) orang, golongan II 24 (dua puluh empat) orang, golongan I 17 (tujuh belas) orang.

Tabel 1 Jumlah pegawai / Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan Yang Tersusun Dengan Kriteria Gender.

No	Jabatan	Jenis Kelamin		
		Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kabid	4	-	4
4.	Kepala UPTD	3	2	5
5.	Kepala Seksi	9	3	12
6.	Kasubbag	7	-	7
7.	Staf	44	8	52
	Total	69	13	82

Jumlah terbanyak PNS di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah Golongan III yang berjumlah 34 orang

atau 41 % dari jumlah keseluruhan pegawai. Berikut Tabel Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau berdasarkan Golongan dan Gender.

Tabel 2 . Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Gender

Golongan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
IV	7	0	7
III	25	9	34
II	23	1	24
I	14	3	17
JUMLAH	69	13	82

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019

Tabel 3. Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Gender Pegawai

pendidikan	Gender		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
STRATA 3	0	0	0
STRATA 2	4	0	4
STRATA 1/D IV	22	8	30
DIPLOMA III	4	1	5
DIPLOMA II	0	0	0
DIPLOMA I	0	0	0
SLTA	23	1	24
SLTP	7	0	7
SD	9	3	12
JUMLAH	69	13	82

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019

Dari jumlah tenaga kerja yang ada di DLHK masih terdapat kekurangan tenaga kerja terutama pada Bidang kebersihan dan UPTD yang ada.

Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2019 sarana kerja yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel.4 Sarana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau

No.	Sarana Kerja	Jumlah
1.	Gedung Kantor	4 Bangunan
2.	Kendaraan roda 4	16 unit
3.	Kendaraan roda 2	13 unit
4.	Excavator	2 Unit
5.	Well loder	1 unit
6.	Kendaraan roda 6	21 unit
4.	pH Meter	2 unit
5.	TDS meter	1 unit
6.	AAS	1 Unit
7.	AC	11 Unit
8.	Laptop/Note Book	5 unit

9.	Komputer (PC)	19 unit
10.	Handy Cam	1 unit
11.	Printer	19 unit
12.	Telephone (PABX)	1 unit
13.	Faksimile	1 unit
14.	TV	6 Unit
15.	Sound System	2 Unit
16.	Meja kerja	66 Unit
17.	Sofa	1 set
18.	Alat-alat Laboratorium LH	1 paket
19.	Kursi dan meja Ruang Rapat	50 kursi dan 10 meja panjang
20.	Kendaraan Roda 3	6 unit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau 2019

Dari tabel sarana dan prasarana masih terdapat kekurangan terutama kendaraan operasional dilapangan, laptop dan bangunan kantor serta fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance*. Dalam lima tahun kedepan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengedepankan isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau yaitu :

1. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup

Berbagai potensi sumber daya alam di Kabupaten Berau dapat dimanfaatkan sebagai penunjang maupun dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam yang kurang memerhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas, secara cuma-cuma. Air, udara, iklim, serta kekayaan alam lainnya dianggap sebagai anugerah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula pandangan bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan kelestarian fungsinya sendiri. Pandangan demikian sangat menyesatkan, akibatnya masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini dipersulit dengan adanya berbagai masalah mendasar seperti kemiskinan, kebodohan, dan keserakahan.

Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam di lingkungan hidup sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar bagi kehidupan makhluk di bumi, terutama manusia

yang populasinya semakin besar. Beberapa permasalahan pokok dapat digambarkan berikut ini:

a. Terus menurunnya kondisi hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang penting, tidak hanya dalam menunjang perekonomian wilayah tetapi juga dalam menjaga daya dukung lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem wilayah. Berdasarkan hasil telaah *World Agro Forestry Center dan The Nature Conservancy* (TNC) pada tahun 2009 saja atau selama periode 1990 sampai 2008 sekitar 39.000 hektar Hutan Berau mengalami kerusakan akibat deforestasi dan degradasi serta menghasilkan emisi karbon dioksida lebih dari 20 juta ton.

Meningkatnya kerusakan itu masih akan terus terjadi seiring tingginya ambisi perusahaan-perusahaan tambang yang ada untuk mencapai target produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Ancaman lain terhadap hutan Berau cukup tinggi jika pembangunan tidak dilakukan dengan bijaksana. Dengan dinamika pembangunan dan kegiatan penambangan yang semakin meningkat, maka kuantitas hutan mulai menurun. Tak hanya itu, komitmen perusahaan juga saat ini semakin menurun.

b. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang tinggi dan beragam di

Indonesia. Di wilayah laut kabupaten ini terdapat terumbu karang yang luas dengan kondisi cukup baik. Keragaman terumbu karang Berau tertinggi kedua di Indonesia setelah Raja Ampat dan ke tiga di dunia. Hutan *mangrove* ditemukan di Delta Berau dan di sepanjang daerah pesisir. Sejumlah pulau-pulau kecil dan ekosistem padang lamun juga terdapat di daerah ini. Beberapa spesies yang dilindungi dapat ditemukan seperti penyu, paus, lumba lumba, duyung dan beberapa spesies lainnya. Perairan Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki habitat penyu hijau terbesar di Indonesia. Selain itu, potensi perikanan dan pariwisatanya masih baik. Namun demikian, di kawasan pesisir dan laut Berau juga terdapat berbagai permasalahan seperti kerusakan terumbu karang, penurunan populasi penyu, praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, dan lain sebagainya.

Kerusakan daerah pesisir dan indikasi perkembangan Delta Sungai Mahakam dan Berau ke arah lepas pantai, erat sekali hubungannya dengan kegiatan di daratan Kalimantan timur terutama eksploitasi kayu secara liar (*illegal logging*) dan penebangan hutan *mangrove* di daerah pesisir yang makin lama tidak terkontrol. Selain itu, kendati masuk ke dalam salah satu tujuan wisata bawah laut kelas dunia, Kabupaten Berau masih harus berlutut dengan maraknya penggunaan bom dan racun ikan yang digunakan oleh nelayan

setempat. Saat ini kerusakan terumbu karang yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau mencapai 60% dari luas total sebesar 480.000 hektare. Ini salah satunya diakibatkan oleh cara menangkap ikan dengan bahan kimia dan bom, selain karena faktor alam. “Kita perkirakan kerusakannya sudah 60%. Memang tidak semua karena manusia, juga karena pemanasan global,” ujarnya. Sebanyak 12 pulau yang masuk dalam Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau, Kalimantan Timur dengan luasan 1,2 juta ha, diperkirakan sebanyak 40 persen atau 480.000 ha merupakan kawasan terumbu karang. Terumbu Karang Berau memiliki ribuan jenis terumbu karang dan puluhan ribu keanekaragaman hayati mendiami pulau itu, termasuk penyu hijau.

Dengan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar beserta permasalahannya, wilayah pesisir dan laut Kabupaten Berau perlu dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini guna menjaga kelestarian dan berjalannya fungsi dari sumberdaya tersebut sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

c. Citra pertambangan yang merusak lingkungan

Aktifitas pertambangan di Berau yang mempunyai potensi merusak lingkungan jika tidak diatur, diawasi dan dikelola dengan bijak. Sifat usaha pertambangan, khususnya tambang terbuka (*open pit mining*),

selalu merubah bentang alam sehingga mempengaruhi ekosistem dan habitat aslinya. Dalam skala besar akan mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dengan citra semacam ini usaha pertambangan cenderung ditolak masyarakat. Citra ini diperburuk oleh banyaknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat dapat merusak lingkungan.

d. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*)

Kabupaten Berau termasuk daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan tersebut terletak baik di perairan maupun daratan. Keanekaragaman hayati flora dan fauna akuatik di Kabupaten Berau yang banyak dijumpai di perairan atau kawasan laut kepulauan Derawan meliputi *mangrove*, lamun (*seagrass-meadows*), terumbu karang, ikan karang, Cetacean dan Manta Rays (kelompok paus dan lumba-lumba), penyu, ubur-ubur, biota lainnya (decapoda, alga, plankton, gastropoda, benthic foraminifera).

Keanekaragaman hayati flora dan fauna daratan di Kabupaten Berau banyak dijumpai di hutan, dan hasil survei fauna darat menunjukkan telah ditemukan sebanyak 42 jenis mamalia, 108 jenis burung, 6 jenis reptil, 9 jenis amphibi, 35 jenis ikan air tawar dan 14 jenis nyamuk. Fauna mamalia terdiri dari 4 jenis primata, 10 jenis rodentia, 3 jenis tupai, 3 jenis kucing, 4 jenis tikus, 9 jenis kelelawar dan 9 jenis

mamalia lainnya. Bekantan dan orang utan termasuk mamalia dan merupakan endemik Pulau Kalimantan, sedangkan 13 jenis mamalia yang termasuk kategori dilindungi, yaitu beruang madu, garangan, kancil, kukang, kijang kuning, kucing hutan, landak, macan dahan, musang hitam, muncak, pelanduk napu, rusa, dan trenggiling. Fauna burung (avifauna) diantaranya adalah beo atau tlung (*Gracula religiosa*), elang bondol (*Hallaster indus*), burung raja udang (*Alcedo meninting*) yang merupakan avifauna kategori dilindungi. Sedangkan reptil kategori dilindungi adalah ular sawa (*Phyton molurus*), dan 3 jenis amphihi. Kekayaan keanekaragaman hayati tersebut akan hilang jika tidak dilindungi dan dipelihara dengan bijak.

e. Pencemaran air semakin meningkat

Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktifitas tambang yang tidak ramah lingkungan. Aktifitas tambang batubara di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara tambang terbuka, walaupun ada beberapa yang menggunakan tambang bawah tanah (*underground mining*), sehingga akan berdampak terhadap perubahan bentang alam, sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, serta secara umum menimbulkan kerusakan pada permukaan bumi. Dampak ini secara otomatis akan mengganggu ekosistem di atasnya, termasuk tata air (Subardja, 2007). Menurut Sayoga (2007) permasalahan lingkungan dalam aktivitas pertambangan batubara umumnya terkait dengan Air

Asam Tambang (AAT) atau *Acid Mine Drainage* (AMD). Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair. Pestisida dan herbisida yang berlebih dari perkebunan kelapa sawit juga berpotensi mencemari sungai. Pengelolaan limbah yang kurang baik (membuang langsung ke sungai) mengakibatkan air tercemar, kotor, dan bau yang efeknya berbahaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Marganingrum dan Noviard (2010) diketahui bahwa aktifitas tambang secara langsung maupun tak langsung mencemari air. Hasil analisis data yang diperoleh baik di lapangan maupun analisis laboratorium, baik dari sampel air maupun sampel tanah, menunjukkan bahwa keasaman air di sepanjang Sungai Lati lebih disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar penambangan batubara, daripada pencemaran dari limbah hasil pengolahan batubara. Hal ini ditunjukkan dengan pH sampel air dari outlet pengolahan sebesar 6,3 pada saat hujan dan 9,7 pada saat tidak hujan. Setelah mendapatkan masukan dari aliran sungai yang berasal dari disposal (A5), pH Sungai Lati kembali turun pada nilai 4. Oleh karena itu pengelolaan lahan bekas tambang perlu dilakukan secermat mungkin untuk menghindari kontak dengan udara dan air dari luar. Untuk meminimalisir polutan dari lokasi bekas

tambang ataupun tanah disekitar penambangan batubara yang kaya akan mineral sulfide.

f. Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun

Pencemaran udara di Kabupaten Berau lebih disebabkan adanya pembakaran lahan yang rutin dilakukan masyarakat tiap tahunnya.

Kualitas udara di Tanjung Redeb semakin menurun saat musim tanam tiba atau pembukaan lahan. Ini tidak lain akibat gangguan asap tebal yang mengurung langit akibat pembakaran lahan. Hal ini tentu memerlukan suatu pengaturan dan pemahaman kepada masyarakat serta perlu segera diambil langkah antisipasi agar kedepannya tidak terjadi hal seperti ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencans Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan Peluang dan inovasi. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan konsisten dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah yang lebih baik. Khususnya meningkatkan kualitas lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan aturan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berpedoman pada RPJPD dan memerhatikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Berau, serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka visi dan misi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA
SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA
BERKELANJUTAN**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Berau menetapkan misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan berikut ini.

Misi Pertama: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sarana dan prasarana publik merupakan suatu bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Berau. Hal lain yang tidak kalah penting dari kebutuhan sarana dan prasarana publik adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok misalnya, sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.

Peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diharapkan akan memengaruhi

peningkatan pendapatan daerah, menciptakan serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Berau. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut adapula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk meningkatkan integritas, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.

Mengingat penting dan strategisnya peran sarana dan prasarana publik dalam kehidupan bermasyarakat, maka kepentingan warga sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang optimal, baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi. Selain itu, perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen sarana dan prasarana publik juga perlu mendapat kepastian. Penyelenggaraan sarana dan prasarana publik perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lebih luas jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat, dengan tetap memerhatikan kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan merupakan sistem yang dapat memenuhi rasa keadilan yaitu dengan mengakomodasi kebutuhan atau permintaan akan aksesibilitas semua pengguna sarana dan prasarana publik dengan aman dan nyaman, memenuhi tingkat efisiensi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya energi maupun pemanfaatan ruang; dapat dikelola secara transparan dan partisipatif; serta menjamin kesinambungan untuk generasi mendatang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Berau ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Kabupaten Berau. Adapun tujuan dan sasaran Kabupaten Berau untuk periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi

- Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Berau mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk

menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Strategi Pembangunan Tahun 2016-2021

Strategi	Sasaran
1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya	Terjaganya kualitas air sungai (sungai segah, kelay, Berau)
2. Pengendalian pencemaran udara	Terjaganya kualitas udara
3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)	Menurunnya intensitas emisi
4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau

1. Menurunkan pencemaran air dari sumbernya

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau dalam strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah dengan menurunkan pencemaran air dari sumbernya. Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup harus memperhatikan kualitas air demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik maka perlu disadari bahwa penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil perlu dilaksanakan agar keseimbangan integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian dilakukan dengan mengnyinergikan peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian terutama yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko perubahan ekosistem dengan dampak negatif maupun positif. Salah satu dampak negatif kemajuan ilmu dan teknologi yang tidak digunakan dengan benar adalah terjadinya polusi (pencemaran). Polusi merupakan peristiwa masuknya zat, energi, unsur atau komponen lain yang merugikan kedalam lingkungan akibat aktivitas manusia atau proses alami. Oleh karena itu tranformasi ekonomi berbasis *unrenewable resources* ke *renewable resources* harus dilakukan dengan mewujudkan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam perencanaan pembangunan menuju ekonomi hijau. Diharapkan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau akan mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial serta mengurangi resiko lingkungan dan kerusakan ekologi serta resiko bencana.

2. Pengendalian pencemaran udara

Masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau saat ini di dominasi perubahan iklim, polusi, dan hilangnya sumber daya alam. Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti.

Pencemaran udara merupakan salah satu dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Berau. Laju urbanisasi yang tinggi, motorisasi dan industrialisasi telah menyebabkan permasalahan pencemaran udara yang menyebabkan pencemaran udara menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap kesehatan masyarakat, masyarakat miskin perkotaan, dan produktivitas nasional.

Semakin peliknya masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Berau menyebabkan kekhawatiran berbagai pihak akan kondisi lingkungan dimasa yang akan datang. Udara banyak mengandung polutan, penipisan lapisan ozon yang bisa mengganggu ekosistem bumi dan efek rumah kaca. Selain disebabkan oleh faktor alam, pencemaran udara lebih banyak disebabkan oleh manusia, misalnya dari kendaraan bermotor, kegiatan industri dan sebagainya. Selain dapat membahayakan lingkungan, pencemaran udara juga dapat membahayakan kesehatan manusia.

Untuk mencegah terjadinya pencemaran udara yang lebih lanjut hendaknya dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan menjaga kebersihan udara dan meminimalkan pencemaran udara, misalnya tidak memakai kendaraan bermotor yang sudah tua, tidak membuang gas yang berbahaya secara sembarangan terutama bagi kegiatan industri, dan lain sebagainya agar kebersihan udara Kabupaten Berau tetap terjaga.

3. Pengurangan emisi GRK berbasis lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan)

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia termasuk di Kabupaten Berau. Posisi geografis Kabupaten Berau yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* pada tahun

2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global.

Pemerintah Kabupaten Berau harus melakukan berbagai kegiatan nasional dan sektoral yang dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK seperti program berbasis lahan seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan serta pemanfaatan teknologi energi bersih, pengurangan pemakaian BBM bersubsidi, khususnya dengan gas dan energi terbarukan, program konservasi energi dan lain-lain.

Sinergitas kebijakan lintas Kementerian dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat mendorong pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Untuk itu, masyarakat sudah harus bergerak ke dalam kegiatan konkrit yang berwawasan lingkungan.

4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur ulangan sampah. Kehadiran sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersial maupun industri tidak bisa dihindari bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu.

Penanganan sampah di Kabupaten Berau dilakukan dengan mengangkut sampah dari TPS dan dari rumah – rumah kemudian di buang ke TPA (tempat pembuangan Akhir).

Berdasarkan uraian tersebut pengelolaan sampah tidak cukup hanya dilakukan dengan manajemen 3P (Pengumpulan, Pengangkutan dan Penimbunan di TPA). Sampah dikumpulkan dari sumbernya kemudian diangkut ke TPS dan terakhir ditimbun di TPA, tetapi reduksi sampah dengan mengolah sampah untuk dimanfaatkan menjadi produk yang berguna perlu dipikirkan.

b. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan

isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh SKPD yang terlibat di dalamnya.

c. Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, Pada Anggaran tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. 80.504.280.317 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 8.724.607.500
2. Belanja Langsung = Rp. 71.779.672.817

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 9 (sembilan) Program dan 40 (empat puluh) Kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel II.5

Tabel 5 Program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran
1	2	3	4
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.080.624.000
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	368.989.000
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	18.000.000
16	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Rp	130.989.000
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000
III	Program Peningkatan Displin Aparatur	Rp	150.000.000
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000
IV	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Rp	112.000.000
19	Binbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp	112.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	136.100.000

20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000
21	Sosialisasi kinerja program SKPD	Rp	20.000.000
22	Konsolidasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan	Rp	107.500.000
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	11.190.410.000
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000
24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 (DAK)	Rp	808.817.000
25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	46.001.323.317
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	434.425.000
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	6.305.801.500
39	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.500

	Jumlah Belanja Langsung	Rp	71.779.672.817
--	--------------------------------	-----------	-----------------------

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2019, dengan Anggaran **Rp. 71.779.672.817** terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2019 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. **44.542.350.317** yang masuk dalam batang tubung anggaran DLHK, dimana anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan terkendala masalah pelelangan serta luasan lokasi penanaman.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, penetapan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, Indikator Kinerja Utama ini merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2019 yang mencakup :

1. Terjaganya Kualitas air sungai
2. Terjaganya Kualitas Udara

3. Menurunnya Intensitas Emisi

4. Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

Mempertahankan kualitas lingkungan hidup

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu kualitas daya dukung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan tujuan dari misi pertama yaitu “Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Adapun sasaran dari tujuan ini ialah:

- Terjaganya kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau)
- Terjaganya kualitas udara
- Menurunnya intensitas emisi
- Prosentase cakupan pelayanan volume sampah yang tertangani

VISI: MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran (satuan)	Kondisi awal	TARGET TAHUNAN					Target Akhir	
			2016	2017	2018	2019	2020		
Misi I : Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan									
1 Mempertahankan kualitas lingkungan hidup									
1	Terjaganya kualitas air sungai	Tingkat pencemaran Kualitas air sungai (Sungai Segah, Kelay, Berau indek pencemaran/IP <5	3,71	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5
2	Terjaganya kualitas udara	Indek standar pencemaran udara (ISPU < 100)	80,93	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100	< 100
3	Menurunnya intensitas emisi	Jumlah Emisi yang diturunkan dari pemanfaatan lahan (juta ton CO2 eq)	449.000 ton Co2 eq	442.000 ton Co2 eq	435.000 ton Co2 eq	428.000 ton Co2 eq	421.000 ton Co2 eq	414.000 ton Co2 eq	406.000 ton Co2 eq

	4	Prosentase cakupan pelayanan / Prosentase volume sampah yang tertangani (persen)			37%	40%	42%	44%	46%	48 %
--	---	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	------

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja DLHK Kabupaten Berau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DLHK tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kinerja (RENJA) DLHK Kabupaten Berau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Berau selama tahun lalu dan perkiraan target tahun 2019 Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Rencana kinerja tahun 2019

Kode					Uraian program/kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja				Pagu indicator (2019)	
							Program/outcome		Kegiatan/output		Kegiatan	Program
							uraian	target	uraian	target		
2	5				Urusan Wajib							
2	5	1			Bidang urusan Lingkungan Hidup							28,955,000,000
2	5	1	1		Program pelayanan administrasi perkantoran		Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	90%				8,018,000,000
2	5	1	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Berau			Jumlah surat	1000 surat	3,000,000	
2	5	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Berau			Tersedianya jasa komunikasi air dan listrik	4 jenis	250,000,000	
2	5	1	1	6	Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional	Kab. Berau			Tersediannya biaya oprasional dan perawatan kendaraan dinas	50 unit	2,530,000,000	
2	5	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Berau			Tersediannya honor pengelola keuangan	12 orang	200,000,000	

2	5	1	1	8	Penyedia jasa kebersihan kantor	Kab. Berau				Tersedianya jasa kebersihan	5 buah	30,000,000	
2	5	1	1	9	Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor	Kab. Berau				Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	30 unit	80,000,000	
2	5	1	1	10	Penyediaan ATK	Kab. Berau				Tersedianya ATK	10 jenis	20,000,000	
2	5	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Berau				Tersedianya barang cetak dan penggandaan	10 jenis	40,000,000	
2	5	1	1	12	Penyediaan komponen intalasi listrik	Kab. Berau				Tersedianya peralatan listrik	2 jenis	35,000,000	
2	5	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab.Berau				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	120,000,000	
2	5	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab.Berau				Tersedianya surat kabar dan majalah	5 surat kabar/majalah	15,000,000	
2	5	1	1	17	Penyediaan makan dan minum	Kab.Berau				Tersedianya makan dan minum rapat/tamu	108 porsi	80,000,000	
2	5	1	1		Penyediaan makan dan minus pegawai	Kab.Berau				Tersedianya makan dan minum pegawai	116 porsi	15,000,000	
2	5	1	1	18	Rapat-rapat koordinasi luar daerah	Luar kab. Berau				Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah	25 kali	400,000,000	
2	5	1	1	19	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Kab.Berau				Tersedianya belanja perjalanan dinas daerah	50 kali	100,000,000	
2	5	1	1	20	Penyediaan jasa adminitrasi teknis perkantoran	Kab.Berau				Terbayarnya honor PTT	117 orang	4,100,000,000	

2	5	1	2		Program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur		Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	90%				510,000,000
2	5	1	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/oprasional	Kab. Berau			Tersedianya kendaraan dinas	8 unit		160,000,000
2	5	1	2	10	Pengadaan mebeler	Kab. Berau			Tersedianya mebeller sesuai dengan kebutuhan	3 jenis		50,000,000
2	5	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Berau			Terjaganya gedung/kantor	4 unit		300,000,000
2	5	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin pegawai	90%				270,000,000
2	5	1	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kab.Berau			Meningkatnya disiplin petugas lapangan	150 setel		150,000,000
2	5	1	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	Kab.Berau			Meningkatnya disiplin pegawai	116 steel		120,000,000
2	5	1	5		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Prosentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualitas pd unit	90%				150,000,000
2	5	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan undang-undang	Luar Kab.Berau			Terlaksananya bimtek sumber daya aparatur	10 orang		150,000,000

2	5	1	6		Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah laporan keuangan OPD yang memenuhi standar	1 dokumen				210,000,000
2	5	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Kab. Berau			Tersusunya laporan kinerja OPD	1 dokumen	10,000,000	
2	5	1	6	2	Monitoring, Evaluasi dan Laporan	Kab. Berau			Terlaksananya monitoring program	4 lokasi	200,000,000	
2	5	1	15		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Prosentase sampah yang tertangani	60%				9,700,000,000
2	5	1	15	2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kab. Berau			Tersediannya sarana dan prasarana pengelola persampahan	3 unit	5,000,000,000	
2	5	1	15	3	Pengembangan masterplan persampahan	kab. Berau			Tersusunya dokumen masterplan persampahan	1 dokumen	150,000,000	
2	5	1	15	5	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	kab. Berau			Jumlah petugas yang meningkat kompetensinya di bidang teknologi persampahan	10 orang	200,000,000	
2	5	1	15	18	Penanganan sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	Kab. Berau			Tertanganinya sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	80 orang	4,000,000,000	

2	5	1	15	19	Peningkatan kemiteraan dan penyediaan informasi publik	Kab.Berau			Jumlah kemiteraan	2 kemiteraan	200,000,000	
2	5	1	15	20	Penanganan sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	Kab. Berau			Tertanganinya sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	10 KM	150,000,000	
2	5	1	16		Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH		Indek Pencemaran air	< 5				2,200,000,000
2	5	1	16	3	Pemantauan kualitas lingkungan	Kab. Berau			Pemantauan Ketaatan perusahaan terhadap peraturan LH	1 Dokumen	200,000,000	
2	5	1	16	7	Pengkajian dampak lingkungan	Kab. Berau			Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai ijin lingkungan	100 dokumen	200,000,000	
2	5	1	16	14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian LH	Kab.Berau			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	1 Kelompok Masyarakat	400,000,000	
2	5	1	16	21	Pemantauan Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab.Berau			Jumlah Pemantauan	4 kecamatan	200,000,000	
2	5	1	16	22	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Kab. Berau			Meningkatnya Usaha atau Kegiatan yang taat terhadap LH	20 pelaku usaha	200,000,000	
2	5	1	16	23	Pengawasan pengelolaan limbah B3	Kab. Berau			Terkendalnya pengelolaan LB3	24 pelaku usaha	200,000,000	

2	5	1	16	24	Pemantauan Kualitas Air Sungai	Kab. Berau			Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air Sungai	3 sungai	200,000,000	
2	5	1	16	26	Fasilitas laboratorium lingkungan hidup	Kab. Berau			Jumlah parameter uji Lab sesuai standar	9 parameter	200,000,000	
2	5	1	16	29	Pemantauan evaluasi laporan emisi gas rumah kaca (GRK)	Kab. Berau			Tingkat Emisi karbon	414.000 ton CO2 eq	200,000,000	
2	5	1	17		Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam		Cakupan sumber daya alam yang dilindungi dan dikonservasi	8.189 ha				200.000.000
2	5	1	17	19	Pelindungan dan konservasi kawasan karst berau	Kab. Berau			Luas perlindungan dan konservasi Kawasan karst	8.145 ha	200,000,000	
2	5	1	19		Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH		Jumlah informasi LH yang terupdate	2 dokumen				1,000,000,000
2	5	1	19	1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	sekolah Kab. Berau			Jumlah sekolah yang mendapatkan adiwiyata	2 sekolah	200,000,000	
2	5	1	19	2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kab. Berau			Tersusunnya buku Laporan SLHD	1 buku	400,000,000	
2	5	1	19	7	Pekan lingkungan hidup	Kab. Berau dan luar kab berau			Terselenggaranya PLH	2 even	200,000,000	
2	5	1	19	8	Penanganan kasus LH	Kab. Berau			Tertanganinya dugaan kasus dan pencemaran LH	5 kasus	200,000,000	
2	5	1	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau		luasan RTH	423.321 m²				6,497,000,000

2	5	1	24	5	Penataan RTH	Kab. Berau			Penataan RTH	5 lokasi	2,497,000,000	
2	5	1	24	6	Pemeliharaan RTH	Kab. Berau			Pemeliharaan RTH	4 Kecamatan	4,000,000,000	
2	5	1	25		Program Pelayanan Administrasi Penilaian AMDAL		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Penilaian AMDAL	3 dokumen				200,000,000
2	5	1	25	02	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Kab. Berau			Terbitnya dokumen lingkungan	3 Dokumen	200,000,000	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pemilik instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atasan kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Berau, perjanjian kinerja kepala DLHK di tanda tangani oleh Bupati Berau, eselon III ditandatangani oleh eselon II, eselon IV ditandatangani oleh eselon III dan untuk pelaksana ditandatangani oleh eselon IV.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :

Jabatan :

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Januari, 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

()

()

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Eselon

NO	Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1			
2			
3			

Program Kegiatan

Anggaran

1.

Rp. -

2.

Rp. -

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2019
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7	1,87 Cemar Ringan
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	29.9	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	424.845	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85	80

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 2,7 cemar ringan sedangkan realisasi tahun 2019 ini 1,87 juga cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk

sasaran terjaganya kualitas udara target <100 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 424.845 kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya pada tahun 2019 adalah 362.615 dalam target intensitas emisi setiap tahunnya harus turun. sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian indikator Kinerja Utama tahun 2019 merupakan penilaian beberapa indikator kinerja sasaran utama yang telah ditetapkan dalam program kegiatan yaitu :

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan 1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615

4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	50 %	80%
---	---	---	------	-----

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima (<5) sedangkan realisasi pada tahun 2019 dengan nilai 2,27 ini merupakan cemar ringan. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara yang targetnya < 100, sedangkan realisasi pengambilan sampling dengan nilai 28,879 masih dibawah target dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan, sehingga target emisi 421.000 ton Co2-eq turun menjadi menjadi 362.615 ton Co2-eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2019
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7	1<IP<5 Cemar Ringan 1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	29,9	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	424.845	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	80%

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 2,7 cemar ringan sedangkan realisasi tahun ini 1,87 juga cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara target <100 sedangkan hasil yang telah dilakukan

pada tahun 2019 dengan nilai 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 424.845 ton Co2-eq kinerja tahun lalu sedangkan realisasinya tahun 2019 realisasinya 362.615 ton Co2-eq, dalam target intensitas emisi setiap tahunnya menurun, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan, 1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000 ton CO2 eq	362.615 ton Co2-eq
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	46%	80%

Pada tabel diatas sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 1,87. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan senilai 362.615 ton Co₂-eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau prosentase mencapai 80%.

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pada capaian kinerja pada tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terutama pada target RPJMD dan Renstra ada kegiatan yang mengalami kenaiakan target yang yang ada untuk keberhasilan terutama dukungan dari dana, sumber daya manusia, dan kerjasama antar instansi yang terkait. begitu juga sebaliknya kegagalan disebabkan oleh dana untuk melakukan pengukuran hasil sampling, sumber daya manusia untuk melakukan pengujian sampling, dan kurangnya informasi dari instansi yang terkait masalah lingkungan.

3.3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 1,87. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami

penurunan yaitu 362.615 ton Co2-eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau dengan prosentase 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran target dan realisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan 1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615 ton Co2-eq
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	46 %	80%

3.3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sungai antara kinerja tahun lalu dan realisasi masih dalam batas target yaitu di atas satu dibawah lima ini merupakan cemar ringan, sedangkan nilai untuk kinerja tahun lalu 2,7 cemar ringan sedangkan realisasi tahun ini 1,87 cemar ringan, masih sesuai dengan target. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara tahun lalu dengan nilai 50,5 sedangkan hasil yang telah dilakukan pada tahun 2019 dengan nilai 28,879 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara kinerja tahun lalu dan realisasi mengalami perbedaan yaitu 424.845 kinerja tahun lalu sedangkan realisasi tahun 2019 adalah 362.615 ton CO2 eq, intensitas emisi setiap tahunnya harus turun.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan kinerja tahun lalu

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja tahun lalu	Realisasi tahun 2019
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sunbgai segar, sungai Kelay, sungai berau IP<5	1<IP<5 Cemar Ringan 2,7	1<IP<5 Cemar Ringan 1,87

2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	29,9	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	424.845	362.615 ton CO2 eq
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	85 %	80 %

3.3.3 Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Strategis Organisasi

Program/kegiatan yang selama ini berjalan tahun 2019 pencapaian target yang telah di tetapkan dalam dokumen strategis sudah dapat berjalan sesuai dengan target tetapi masih ada yang melebihi target. Pada tabel sasaran terjaganya kualitas air sungai antara target RPJMD dan realisasi masih dalam batas target yaitu < 5 ini merupakan cemar ringan dengan nilai 1,87. Sedangkan untuk sasaran terjaganya kualitas udara untuk target RPJMD kurang dari seratus (<100) sedangkan hasil dari pemantauan kualitas Udara adalah 29.9 dan untuk sasaran menurunnya intensitas emisi antara target dan realisasi mengalami penurunan dengan 362.615 ton CO2 eq, sedangkan untuk capaian tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau prosentasenya adalah 80 %.

Indikator Kinerja Sasaran realisasi dan Target Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi
	1	2	3	4
1	Terjaganya Kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai : sungai segah, sungai Kelay, sungai berau IP<5	<5	1<IP<5 Cemar ringan, 1,87
2	Terjaganya Kualitas Udara	Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU<100)	<100	28,879
3	Menurunnya Intensitas Emisi	Tingkat emisi Karbon (ton CO2eq)	421.000	362.615
4	Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Berau	Prosentase Cakupan pelayanan/prosentase volume sampah yang tertangani	46 %	80%

3.3.4 Analisa penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja yang telah dilakukan

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan program yang dilaksanakan sudah sesuai tetapi ada

beberapa kendala yaitu: dalam pengambilan sample udara dan hasil masih dari laporan DLH provinsi Kalimantan Timur serta dalam penghitungan emisi karbon masih menggunakan pihak NGO. Sedangkan keberhasilan yaitu kita masih dapat melakukan kegiatan sesuai dengan target yang diinginkan.

3.3.5 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau memiliki Pegawai Negeri Sipil berjumlah 82 orang, dimana 68 orang diantaranya adalah laki – laki dan 14 orang diantaranya perempuan. Penggunaan sumber daya manusia untuk dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan memang masih kekurangan tenaga kerja sehingga untuk mengefesienkan dengan cara merangkap – rangkap pekerjaan agar semua pekerjaan dapat dilaksanakan.

3.3.6 Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, maka ditetapkan program dan kegiatan pada tahun 2019 yaitu 9 (sembilan) Program dan 40 (empat puluh) kegiatan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel realisasi program/kegiatan Anggaran belanja langsung

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.080.624.000	6.810.889.550	96,19
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000	2.323.000	92,9
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000	171.586.950	77,9
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000	1.827.324.437	96,6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000	157.954.000	71,2
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.914.400	99,1
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000	19.856.000	99,2
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000	29.997.000	99,9
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000	18.420.100	75,1
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	4.451.000	55,6
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	3.780.000	75,6
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000	47.632.900	95,2
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000	257.001.863	96,9
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000	110.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000	4.150.647.400	98,2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	368.989.000	342.605.500	92,85
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	18.000.000	0	0
16	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Rp	130.989.000	124.380.500	94,9
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000	218.225.000	99,1
III	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	150.000.000	138.061.000	92
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	138.061.000	92
IV	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp	112.000.000	88.950.000	79,42
19	Binbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp	112.000.000	88.950.000	79,42

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	136.100.000	134.096.000	98,53
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000	8.004.000	93
21	Sosialisasi kinerja program SKPD	Rp	20.000.000	18.892.000	94,4
22	Konsolidasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan	Rp	107.500.000	107.200.000	99,7
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	11.190.410,000	9.597.768.720	85,77
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000	4.894.590.620	87,4
24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 (DAK)	Rp	808.817.000	0	0
25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000	4.703.178.100	98,2
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	46.001.323.000	1.363.643.661	2,96
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000	307.583.144	93,7
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000	120.250.025	93,9
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000	380.940.770	92,9
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000	94.541.000	98,9
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000	72.272.800	72,2
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000	78.465.389	59,9
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000	89.126.255	86,6
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000	138.866.800	84,8
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317	81.597.478.	0,18
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp	434.425.000	392.850.353	90,43
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000	90.364.804	82,5
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000	109.817.450	91,5

37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000	113.137.153	98,3
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000	79.530.946	88,3
IX	Program Pengeloaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	6.305.801.500	6.175.200.761	97,93
39	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000	2.196.767.000	97,6
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.000	3.978.433.761	98,1
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	71.779.672.817	25.044.065.545	34,89

Dari hasil analisa terhadap pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau Tahun 2019, dengan sebesar Anggaran **Rp. 71.779.672.817** dengan realisasi sebesar **Rp. 25.044.065.545** baik terhadap pengukuran indikator kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran dapat di laksanakan dengan baik. Untuk tahun 2019 ini ada penambahan anggaran dana DBH (Dana Reboisasi) sebesar Rp. 44.542.350.317 yang masuk dalam batang tubuh anggaran DLHK yang terealisasi hanya Rp. 81.597.478 sekitar 0,18 %, karena begitu juga dengan anggaran DAK sebesar Rp. 808.817.000 anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terkait juknis kementerian dan tidak ada yang mengajukan penawaran pada saat lelang. Demikian pula dengan kegiatan Pengawasan LB3 dengan anggaran Rp. 130.988.000 yang terealisasi hanya Rp. 78.465.389 sekitar 59,90 % dikarenakan ada beberapa anggaran tidak digunakan seperti makan minum rapat dan kegiatan, sisa perjalanan dinas sehingga capaian anggaran belum maksimal tetapi untuk fisik kegiatan sesuai dengan target pada tahun 2019. Begitu juga dengan pengadaan motor dinas dengan anggaran Rp. 18.000.000 tidak dapat terealisasi dikarenakan terhambatnya ketika dalam pelaksana lelang di penyedia barang sehingga waktu untuk dilakukan lelang lagi tidak mencukupi waktunya (Anggaran ABT). Sedangkan untuk kegiatan penyedia komponen instalasi listrik dengan anggaran Rp. 8.000.000 hanya dapat terealisasi Rp. 4.451.500 sehingga hanya 55,6 % tidak dapat digunakan secara maksimal, tetapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan target tahun 2019. Pada umumnya kegiatan mencapai 100%, hanya beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang disebabkan kendala teknis dan non teknis, terutama dengan masuknya DBHDR sebesar Rp 44.542.350.317 ke dalam batang tubuh DLHK

menyebabkan realisasi anggaran tersebut tidak mencapai hingga 70 %, dimana realisasi keuangan DLHK hanya 34,89 % dari anggaran belanja langsung.

3.4 Realisasi Anggaran

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk mendukung pengelolaan bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama 1 tahun, pada Anggaran tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mendapat Alokasi Dana sebesar Rp. . 80.504.280.317 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 8.724.607.500
2. Belanja Langsung = Rp. 71.779.672.817

Alokasi dan realisasi anggaran ini diselesaikan selama 1 tahun adapun program dan kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu 9 (Sembilan) Program dan 40 (empat puluh) kegiatan serta anggaran sebagaimana dapat dilihat pada tabel.

Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran		Capaian %
		target	Realisasi	
1	Belanja tidak langsung	8.724.607.500	7.920.616.228	90.78

Realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2019 dengan rata-rata serapan realisasi keuangan sebesar 90.78 % jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi belanja tidak langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik.

Belanja langsung

No	Program/Kegiatan	Satuan	Besarnya Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	7.080.624.000	6.810.889.550	96,19
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp	2.500.000	2.323.000	92,92
2	Penyediaan Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Rp	220.000.000	171.586.950	77,9
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Rp	1.890.000.000	1.827.324.437	96,6
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp	221.858.000	157.954.000	71,2
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp	10.000.000	9.914.400	99,1
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp	20.000.000	19.856.000	99,2
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	30.000.000	29.997.000	99,9
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	24.516.000	18.420.100	75,1
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	8.000.000	4.451.500	55,6
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	5.000.000	3.780.000	75,6
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	50.000.000	47.632.900	95,2
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	265.000.000	257.001.863	96,9
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp	110.000.000	110.000.000	100
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Rp	4.223.750.000	4.150.647.400	98,2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	368.989.000	342.605.500	92,85
15	Pengadaan kendaraan dinas/oprasioanl	Rp	18.000.000	0	0
16	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Rp	130.989.000	124.380.500	94,9
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	220.000.000	218.225.000	99,1

III	Program peningkatan disiplin aparat	Rp	150.000.000	138.061.000	92,04
18	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Rp	150.000.000	138.061.000	92,04
IV	Program peningkatan disiplin aparat	Rp	112.000.000	88.950.000	92,04
19	Binbingan teknis implementasi perundang-undangan	Rp	112.000.000	88.950.000	79,4
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	136.100.000	134.096.000	98,53
20	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	8.600.000	8.004.000	93
21	Sosialisasi kinerja program SKPD	Rp	20.000.000	18.892.000	94,4
22	Konsolidasi penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kebersihan	Rp	107.500.000	107.200.000	99,7
VI	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan	Rp	9.215.471,000	9.597.768.720	85,77
23	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Rp	5.596.000.000	4.894.590.620	87,4
24	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2 (DAK)	Rp	808.817.000	0	0
25	Penanggulangan Sampah Pada Permukaan Jalan dan Saluran Drainase kota	Rp	4.785.593.000	4.703.178.100	98,2
VII	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Rp	46.001.323.317	1.363.643.661	2,96
26	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Rp	328.000.000	307.583.144	93,7
27	Pengkajian Dampak Lingkungan	Rp	128.000.000	120.250.025	93,9
28	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengendalian lingkungan hidup	Rp	410.000.000	380.940.770	92,9
29	Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Rp	95.500.000	94.541.000	98,9
30	Pengawasan dan penataan ijin lingkungan	Rp	100.000.000	72.272.800	72,2
31	Pengawasan pengelolaan LB3	Rp	130.988.000	78.465.389	59,9
32	Fasilitas Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	102.840.000	89.126.255	86,6
33	Pemantauan Evaluasi Laporan Emisi gas rumah kaca (GRK)	Rp	163.645.000	138.866.800	84,8
34	Penanaman di luar kawasan (DBH)	Rp	44.542.350.317	81.597.478.	0,18
VIII	Program Peningkatan Kualitas	Rp	434.425.000	392.850.353	90,43

	dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
35	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Rp	109.500.000	90.364.804	82,5
36	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Rp	119.925.000	109.817.450	91,5
37	Pekan lingkungan hidup	Rp	115.000.000	113.137.153	98,3
38	Penanganan Kasus LH	Rp	90.000.000	79.530.946	88,3
IX	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp	6.305.801.500	6.175.200.761	97,93
39	Penataan RTH	Rp	2.250.134.000	2.196.767.000	97,6
40	Pemeliharaan RTH	Rp	4.055.667.000	3.978.433.761	98,1
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	71.779.672.817	25.044.065.545	34,89

Realisasi belanja langsung pada tahun 2019 dengan rata-rata serapan realisasi fisik berkisar 80 % sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar 34,89 %, jika diukur dengan skala penilaian maka untuk realisasi fisik belanja langsung pada skala nilai 80 > 100 kategori penilaian baik sedangkan untuk realisasi keuangan belanja langsung pada skala nilai < 55 kategori penilaian kurang, secara keseluruhan penilaian sudah dianggap baik karena pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, yang menjadi permasalahan penyerapan anggaran keuangan dan fisik untuk kegiatan yang berasal dari dana (DBH) DR, dana DAK, pengadaan motor dinas tidak dapat di laksanakan disebabkan gagal lelang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau ini disusun masih mengacu pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja instansi Pemerintah.

Penyusunan LKj-IP tahun 2019 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut:

1. Beberapa indikator baik input, proses output, masih ada yang sasarannya belum memenuhi target. Untuk selanjutnya target yang dicapai untuk setiap tahunnya akan diperbaiki sehingga tercapainya target yang diinginkan.
2. Untuk Indikator Kinerja yang telah dilakukan akan lebih ditingkatkan lagi sehingga hasilnya tidak melebihi target yang ada dalam dokumen Restra.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Clean Government dalam rangka mewujudkan Good Governance, sehingga kedepan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dan dapat di pertanggungjawabkan atau dapat menjadi umpan balik bagi stakeholder (pihak – pihak yang berkepentingan).

LAMPIRAN